

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kesesuaian tersebut ditunjukkan oleh lokasi industri yang berada pada kawasan peruntukan industri, tidak termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta terpenuhinya persyaratan perizinan dan ketentuan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan alih fungsi lahan telah mengikuti mekanisme penataan ruang yang berlaku. Keberadaan LP2B yang luas di wilayah tersebut tetap memerlukan pengendalian yang ketat agar tidak mengganggu ketahanan pangan.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan alih fungsi lahan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Penguatan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga perlu dilakukan secara konsisten melalui kebijakan yang tegas. Evaluasi rencana tata ruang secara berkala diperlukan agar tetap selaras dengan perkembangan wilayah, tanpa mengabaikan keseimbangan antara pembangunan industri dan ketahanan pangan.

Buku-buku:

Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Diva Pitaloka, dkk. 2024. *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Megapress Nusantara, Jakarta

Fauziyah dan Muh Iman, 2020. *Alih Fungsi Lahan*, Deepublish, Yogyakarta

Hadi Arnowo Waskito, 2017. *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta

Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok

L. Syapruddin, dkk. 2017. *Kajian Normatif Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jatiswara, Universitas Mataram

Retno Mawarini, dan Widyarini Indriasti Ayik Christina Efata, 2025, *Dekontruksi Hukum Dalam Pengaturan Alih Fungsi Lahan Untuk Menjamin Kepastian Hukum*, Untag Press, Semarang

Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003 , *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok

Sugiyono, 2023, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi Kedua Alfabeta, Bandung

Sutaryono, dkk. 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta

Jurnal :

Denayu Natasya Mauly Nursyahr, 2021, “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian untuk Kawasan Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus PT Jogja Magasa Iron)”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Evander Kaendung, dkk, 2021, Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, hlm.3, <https://share.google/PV1I589IEbKnx17IW>

Evatul Casanova Noviyanti dan Irwan Sutrisno, 2021, Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Mimika, Program Studi Ekonomi Pembangunan Jambatan Bulan Timika

Gabriel Marcel Anggityo Adhi Nugroho Widagdo, 2024, “Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian untuk Pembangunan Bangunan Rumah Tinggal Di Kabupaten Sleman”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Irpan Suriadiata, 2024, “Kajian Yuridis Urgensinya Penatagunaan Tanah Dalam Mewujudkan Kemakmuran Rakyat” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 6, Dinasti Riview

Layla Mardiyani Fauziyah, dkk, 2018, Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Penerapan Asas Tata Guna Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad*, Vol.2, No.1, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/191/141>

Leonardus Bagas Satrio Aji, 2019, “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non-Pertanian untuk Kegiatan Industri di Tinjau dari Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali”, Yogyakarta

Risca Rahayu dan Tintin Sri Murtinah, 2022, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden, *Journal of Business*

Peraturan Per-Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat
Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163.
Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81.
Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka 2011 – 2031. Lembaran Daerah
Majalengka Tahun 2011 Nomor 11. Sekretariat Daerah, Majalengka.

Internet :

Alih Fungsi Lahan Pertanian,

<https://agribisnis14.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan-pertanian/>

diakses 25 Februari 2026, Pukul 16.45 Wib.

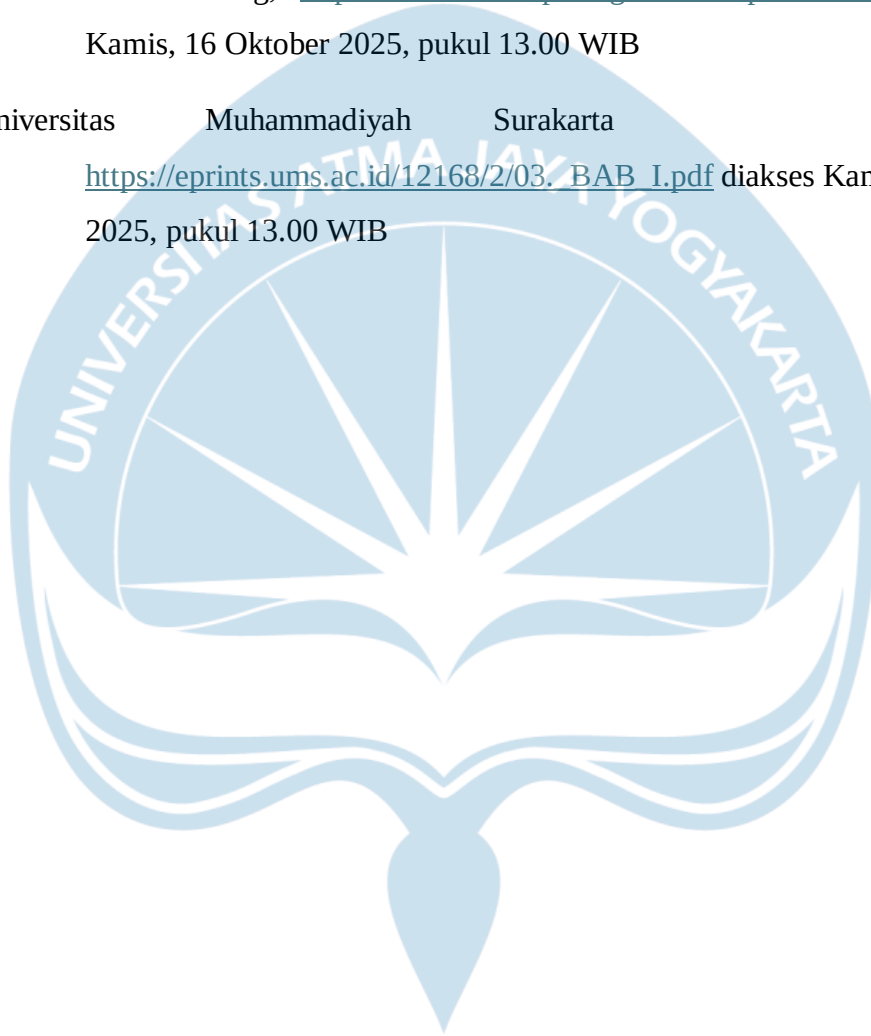
Asas Penataan Ruang, <https://tarubali.baliprov.go.id/asas-penataan-ruang/> diakses

Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB

Universitas Muhammadiyah Surakarta

https://eprints.ums.ac.id/12168/2/03_BAB_I.pdf diakses Kamis, 16 Oktober

2025, pukul 13.00 WIB

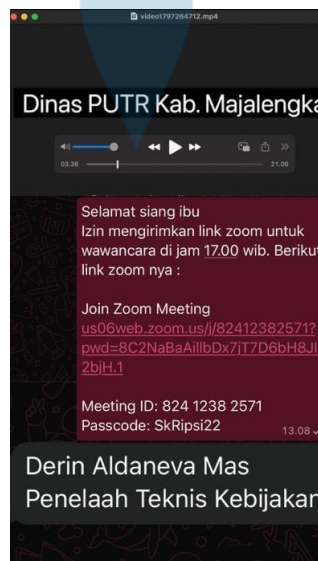


LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Majalengka.



Lampiran 2. Wawancara dengan Ibu Derin Aldaneva Mas yang merupakan bagian Penelaah Teknis Kebijakan di Dinas Tata Ruang Kabupaten Majalengka melalui zoom meeting, pada tanggal 29 Desember 2025.



Lampiran 4. Wawancara dengan Kepala Pengawas Dinas Lingkungan Hidup di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu Bapak Budi Adi Nugraha, pada tanggal 04 November 2025.



Lampiran 5. Surat Izin Penelitian PT. Shoetown Ligung Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 159/V/CD-TH
Hal : Perencanaan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

10 November 2023

Kepada
Yth. PT. Shoetown Ligung Indonesia
Jalan Lemah Sukani (Gandawesi), Buntu, Kec. Ligung, Kabupaten Majalengka,
Jawa Barat 45455

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim juri internal.

Selubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama	: Artha Dita Dwi Aryan Saragih
2. Nomor Mahasiswa	: 220318018
3. Program Keahlian	: Hukum Perikanan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset	: PT. Shoetown Ligung Indonesia
5. Dosen Pembimbing I	: Dr. V. Hesti Supriyanto, S.H., M.Hum.
6. Judul Skripsi	: Perencanaan Adh Fungsional Perikanan ke Non-Perikanan untuk Kawasan Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka
7. No. Handphone / WA	: 08211988842

Pada kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan etis-moral-fakultas, oleh karena itu data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak akan digunakan dipergunakan untuk hal-hal lainnya.

Kas perhatian, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I

Dr. V. Hesti Supriyanto, S.H., M.Hum.
Rektor PT. Shoetown Ligung Indonesia

Alamat Kampus I Gedung Akademi Musan Baru 20 Yogyakarta 55281 URL shoetown.id	Kontak Telepon : +62-274-881001 Fax : +62-274-847973 Email : info@shoetown.id
--	---



Lampiran 6. PT. Shoetown Ligung indonesia



Lampiran 7. Surat Izin Penelitian PT. Hansae Indonesia Utama

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 197/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

10 November 2025

Kepada
Yth. PT. Hansae Indonesia Utama
Tegalaren, Kec. Ligung, Kabupaten Majalengka,
Jawa Barat 45456

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Selhubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Artha Dita Dwi Anyani Saragih
2. Nomor Mahasiswa : 220514674
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : PT. Hansae Indonesia Utama
5. Dosen Pembimbing : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian untuk Kawasan Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka
7. No. Handphone / WA : 082119588842

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat : Kampus I Gedung Ahnasul
Mijen Baru, 28 Yogyakarta 55231
URL : <http://fh.uajy.ac.id>

Kontak :
Telepon : +62-274-561031
Faks : +62-274-561973
Email : fh@uajy.ac.id



Lampiran 8. PT. Hansae Indonesia utama

